

Buruh Angkut dan Keluarga Nelayan di Pelabuhan Muara Angke

R.A. NIDHA NADIA

Birmingham University

Abstract

This research examines the social interaction amongst the fishers and the porters in the Muara Angke region. Muara Angke is a region which is on the north coast of Jakarta. Due to its fisheries potential, fishing activity has become the main livelihood of the people there. In 1977, the concentration of Jakarta's fishing activity in the region has made it the center of traditional fishery in Jakarta. Yet, the concentration of fishing activity conducted in Muara Angke failed to provide economic improvement and most people remain under the poverty line. The root of poverty Muara Angke's fishery community were multidimensional involving social, economic, and political aspects.

Keywords:

Muara Angke; fishing communities; fishing port; north coast; Jakarta

Abstrak

Penelitian ini mengkaji interaksi sosial berdasarkan kegiatan ekonomi perikanan di kalangan nelayan dan buruh angkut di Muara Angke. Muara Angke merupakan sebuah wilayah yang terletak di pantai utara Jakarta. Dengan potensi perikanan yang dimiliki, kegiatan perikanan menjadi mata pencaharian utama masyarakat di Muara Angke. Pada 1977, pemusatan kegiatan perikanan Jakarta di Muara Angke menjadikan wilayah ini sebagai pusat pelabuhan perikanan tradisional di Jakarta. Pemusatan kegiatan perikanan yang dilakukan di Muara Angke tidak memberikan perubahan ekonomi karena sebagian besar masyarakatnya masih berkutat dalam kemiskinan. Akar kemiskinan nelayan Muara Angke bersifat multidimensional karena meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik.

Kata kunci:

Muara Angke; masyarakat perikanan; pelabuhan perikanan; pantai utara; Jakarta

Pengantar

“Pendaratan ikan berlangsung selama 24 jam dan tidak ada waktu khusus kapal mendarat. Kegiatan pendaratan ikan pada pagi hari, kebanyakan orang adalah nelayan, buruh nelayan dan orang-orang yang hanya menyaksikan kegiatan ini sambil duduk di atas tambatan tali ataupun berdiri. Untuk kegiatan pendaratan ikan pada malam hari, yang banyak menyaksikan kegiatan ini adalah istri para nelayan.” (Batuna, 1996: 16)

Kutipan diatas tidak hanya menggambarkan kegiatan pendaratan ikan yang terjadi di kawasan pelabuhan Muara Angke pada pertengahan tahun 1990an, tetapi juga menggambarkan mengenai kelompok masyarakat yang terlibat, peran masing-masing kelompok, serta pentingnya kegiatan pendaratan ikan bagi kelompok-kelompok tersebut mengingat kegiatan tersebut berlangsung selama 24 jam per hari. Kegiatan pendaratan ikan ini merupakan proses awal dari rangkaian aktivitas sosial dan ekonomi yang terjadi di Muara Angke. Secara geografis, wilayah Muara Angke terletak di delta Muara Angke dan berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kali Asin di sebelah timur, Kali Adem di sebelah barat, dan Muara Karang di sebelah selatan (Heuken, 2014: 88).

Kegiatan perikanan dan kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah terbentuk sebelum dilakukan pemusatan di Muara Angke tahun 1977. Meskipun demikian, kala itu belum tampak perubahan maupun perkembangan yang signifikan karena tempat ini masih berbentuk pangkalan pendaratan ikan sederhana. Dengan adanya pemusatan, kawasan pelabuhan Muara Angke mulai dibangun. Menurut pengalaman Harun Sairi, mantan nelayan Muara Angke yang kini bekerja sebagai penjaga Kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), pangkalan pendaratan ikan yang awalnya hanya menjadi tempat berlabuh kapal-kapal kecil nelayan kemudian juga dapat menampung kapal-kapal besar.

Sejak dilakukan pembangunan di tahun 1977, penataan dan pemusatan kegiatan perikanan menjadikan Muara Angke sebagai pusat pelabuhan ikan tradisional di Jakarta (Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, 2005: 325-326). Di bawah Dinas Perikanan PEMDA DKI Jakarta, di tahun 1978 infrastruktur Muara Angke sudah siap menampung seluruh kegiatan perikanan yang terletak di beberapa lokasi di kawasan tersebut. Fasilitas-fasilitas yang disediakan antara lain: perumahan nelayan, pengolahan hasil perikanan tradisional (PHPT), pemasaran hasil perikanan, serta pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2011: 5).

Data produksi perikanan laut di Jawa selama tiga tahun berturut-turut (1979-1981) menunjukkan bahwa jumlah produksi ikan laut di Muara Angke menempati posisi tertinggi dari lima tempat pendaratan dan pelelangan ikan

di DKI Jakarta pasca pemusatan kegiatan perikanan. Tempat pendaratan dan pelelangan ikan lain seperti di antaranya: Sunda Kelapa, Kamal, Kali Baru, dan Donggala, berada di bawah statistik Muara Angke. Di tahun 1980, Muara Angke menghasilkan jumlah produksi terbanyak dengan angka 12.744 ton, disusul Sunda Kelapa pada urutan kedua dengan jumlah produksi 2.472 ton (Biro Pusat Statistik, 1983: 1-3). Pemusatan kegiatan perikanan yang dilakukan oleh PEMDA DKI Jakarta sejak tahun 1977 menjadikan Muara Angke sebagai pusat pelabuhan ikan tradisional di Jakarta dengan tingkat produktivitas tertinggi serta menggeser Sunda Kelapa yang sebelumnya merupakan pusat pasar dan pelabuhan ikan di Jakarta.

Produktivitas yang tinggi di Muara Angke tidak lepas dari peran serta masyarakat perikanan seperti nelayan, pengolah ikan, dan pedagang ikan. Dibandingkan dengan nelayan, pengolah ikan, dan pedagang ikan yang berperan langsung dalam kegiatan penanganan ikan, buruh angkut berfungsi sebagai tenaga yang memindahkan ikan dari pelabuhan ke tempat-tempat lain seperti TPI dan tempat pengolahan ikan yang masih berada dalam kawasan Muara Angke. Oleh karenanya, peranan para buruh ini sering kali luput dari perhatian masyarakat.

Penelitian ini difokuskan pada kehidupan sosial masyarakat perikanan di Muara Angke dengan studi kasus 'kalangan buruh angkut dan keluarga nelayan dalam kegiatan perikanan sejak dilakukannya pemusatan kegiatan perikanan di Muara Angke'. Dari permasalahan utama yang telah disebutkan, muncul beberapa pertanyaan. Pertama, seperti apa kondisi lingkungan Muara Angke sejak dilakukan pemusatan? Kedua, seperti apa struktur sosial, hubungan sosial, dan relasi gender yang terjalin dalam keluarga buruh angkut dan keluarga nelayan di Muara Angke? Ketiga, apakah tingkat produktivitas di Muara Angke mempengaruhi perubahan kehidupan sosial di dalam kelompok masyarakat di pelabuhan Muara Angke?

Pembangunan Pasca Pemusatan Kegiatan Perikanan

Sebelum dilakukan pemusatan kegiatan perikanan, wilayah Muara Angke merupakan rawa-rawa yang tidak berpenghuni. Casinah, pengolah ikan yang bertempat tinggal di Muara Angke sejak 1970an menjelaskan perubahan kondisi alam wilayah Muara Angke.

“Dulunya kan (Muara Angke) rawa sini, rawa kaya cagar alam gitu. Kita babat-babat sendiri, kita bikin-bikin sendiri (kegiatan perikanan sederhana) pada waktu itu. Nah lama-lama diperhatiin sama pemerintah, sama orang-orang (dinas) perikanan, diperhatiin, terus disuruh bikin izin, ditertibkan...”

Ketika modal asing masuk ke Indonesia pada tahun 1970an, beberapa pangkalan pendaratan ikan yang sifatnya masih sederhana di berbagai penjuru tanah air mulai dibangun menjadi pelabuhan ikan dengan

fasilitas yang lebih lengkap. Pembangunan pelabuhan ikan ini diupayakan bersamaan dengan penataan pusat kegiatan perikanan di tiap regional di Indonesia, salah satunya Jakarta (Soewito, et.al., 2000: 89). Kutipan berikut menjelaskan kemajuan infrastruktur di Muara Angke:

“Sejak dibukanya Muara Angke sebagai pusat kegiatan perikanan tradisional dan sentra pemukiman nelayan pada tahun 1977, Muara Angke telah dilengkapi berbagai fasilitas pemenuhan-pemenuhan kebutuhan ekonomi perikanan serta kebutuhan sosial. Selain fasilitas kebutuhan ekonomi perikanan, UPT Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan ikan membangun beberapa fasilitas antara lain pasar grosir ikan, pasar pengecer, tempat pengepakan ikan, dan kios ikan bakar.” (Angelia, et.al., 2006: 6)

Masyarakat setempat menuturkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan perintah pemusatan, tetapi juga membantu membangun fasilitas untuk kegiatan perikanan. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan yang rencana pembangunannya didasarkan pada PELITA III (Soewito, et.al., 2000: 89). Fasilitas pokok di antaranya dermaga, kolam pelabuhan alur layar, penahan gelombang, dan fasilitas lain yang berhubungan dengan pelabuhan. Fasilitas fungsional di antaranya tempat pelelangan ikan, tempat pengolahan, pasar ikan, dan berbagai fasilitas lain yang berhubungan dengan proses pendaratan dan pengolahan ikan. Sementara fasilitas tambahan berupa tempat ibadah, perumahan, gedung serbaguna untuk nelayan, kantin, poliklinik, dan beragam fasilitas lain yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan perikanan (Soewito, et.al., 2000: 89-90). Dapat dikatakan bahwa Muara Angke yang sebelumnya merupakan rawa-rawa dengan pangkalan pendaratan ikan yang pelaksanaannya dikerjakan secara sederhana oleh masyarakat setempat mulai dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan dengan berbagai fasilitas pokok, fungsional, dan tambahan sejak diadakan pemusatan kegiatan perikanan.

Selain dilakukan pembangunan pelabuhan Muara Angke, pemerintah juga melakukan pembangunan dalam bentuk pemukiman masyarakat nelayan. Sejak tahun 1969, kawasan Muara Angke tergabung dalam proyek khusus pemerintah daerah yang bernama Proyek Pembangunan Lingkungan (PPL). Meskipun dinamakan proyek pembangunan lingkungan, konsentrasi dari proyek ini adalah pembangunan perumahan (Amrullah, 1988: 303).

PPL mulai dilaksanakan sejak dikeluarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Ad. 7/3/35/1969 tentang Penetapan Kawasan Muara Karang seluas 53 Ha untuk perkampungan nelayan. Meskipun keputusan tersebut sudah keluar sejak 1969, tetapi pelaksanaan fisiknya di Muara Angke baru dilaksanakan tahun 1974. Awalnya, jenis rumah yang dibangun merupakan

rumah tidak bersusun. Memasuki tahun 1995, pembangunan mulai diarahkan untuk menyediakan rumah susun bagi nelayan (Kurniasari, 2005: 40). Sejak tahun 1978 hingga 1996 telah terealisasi 1128 unit rumah dalam proyek pembangunan perumahan nelayan ini (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2011: 17).

Rumah-rumah tidak bersusun bagi para nelayan yang dibangun dalam rentang tahun 1988-1989 merupakan rumah tipe 21 dengan luas bangunan 21 m² di atas lahan seluas 60 m². Bangunan ini menggunakan fondasi batu kali dengan dinding dan atap yang berbahan bermis (sejenis karang laut). Pada 1989, sebanyak 203 unit rumah diserahkan kepada nelayan di Muara Angke menggunakan sistem sewa atau sewa beli. Rumah-rumah ini diprioritaskan bagi nelayan yang berdomisili di Muara Angke, khususnya bagi mereka yang menjadi anggota Koperasi Perikanan. Selain ditujukan bagi nelayan Muara Angke, perumahan ini juga ditujukan bagi nelayan-nelayan pindahan dari pelabuhan nelayan Kalibaru yang tidak beroperasi lagi sejak tahun 1988 (Kompas, 20 Januari 1989).

No.	Tahun	Jumlah Rumah	Sumber Dana	Lama Angsuran
1	1978	540	Bantuan Presiden Republik Indonesia	Sewa menyewa 2 tahun, 13 tahun sewa beli
2	1988	203	Bantuan Presiden Republik Indonesia	Sewa menyewa 2 tahun, 15 tahun sewa beli
3	1991	38	Dana secara bergulir hasil pengelolaan penyaluran rumah yang sudah dibangun	Sewa menyewa 2 tahun, 15 tahun sewa beli
4	1993	135	Dana secara bergulir hasil pengelolaan penyaluran rumah yang sudah dibangun	-
5	1994	20	Bantuan panitia pusat (Program Bantuan HKSAN)	-
6	1995	80	Dana Sumbangan Ibu TITIK SOEHARTO	-
7	1996	112	Program Bantuan Departemen Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	-
JUMLAH		1128		

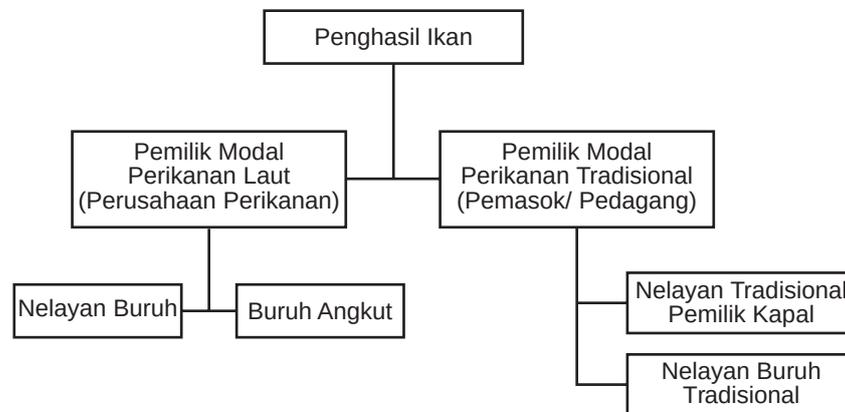
Tabel 1.

Tahap-Tahap Pembangunan Rumah.

Sumber: *Kronologi Pembangunan dan Pemanfaatan Rumah Nelayan, Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke, 2014, Tidak Diterbitkan.*

Antara Buruh Angkut dan Nelayan

A. Struktur Sosial



Bagan di atas menggambarkan struktur masyarakat perikanan di Muara Angke pada sektor penghasil ikan. Tampak pada gambar bahwa buruh angkut dan nelayan berada pada posisi terendah dalam struktur sosial ekonomi di Muara Angke. Kehidupan buruh angkut dapat disetarakan dengan buruh nelayan dan buruh tani dalam hal kepemilikan alat produksi. Mereka menempati posisi terendah karena mereka hanya mampu menyumbangkan jasa tenaga. Di samping buruh angkut, sebagian besar dari masyarakat pesisir adalah nelayan dan buruh yang tidak memiliki alat produksi. Akibatnya, buruh-buruh ini mendapatkan upah yang kecil, tidak sebanding dengan hasil kerjanya (Kusnadi, 2002: 2).

Tidak banyak diversifikasi lapangan pekerjaan di Muara Angke karena konsentrasi mata pencaharian hanya terjadi pada sektor perikanan. Sementara itu, dalam kegiatan perikanan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang sukses sebagai nelayan—mereka yang memiliki alat produksi dan modal—sementara sisanya merupakan nelayan dan buruh miskin (Kusnadi, 2002: 2). Nelayan pemilik kapal di Muara Angke pun kebanyakan merupakan nelayan tradisional yang hanya memiliki kapal-kapal atau perahu kecil dengan teknologi yang tertinggal dibanding kapal-kapal milik perusahaan perikanan yang dioperasikan menggunakan tenaga nelayan buruh. Adapun perusahaan yang bergerak di bidang perikanan kebanyakan dimiliki kalangan Tionghoa yang tidak menetap di Muara Angke. Simak kutipan wawancara Casinah pada 13 Mei 2015 yang berprofesi sebagai pengolah ikan di Muara Angke berikut:

“Ini ibu perlu kasih tau yang sebenarnya ya dik... Dari dulu nelayan tetap nelayan, tidak ada peningkatan. Bos tetap bos, ubah alat-alat ini, pindah yang lain. Ini dilarang, pindah yang lain. Maksudnya alat tangkapnya beda, atau jaringnya beda.

Tapi nelayan, nelayan aslinya itu tetap kuli... Kadang-kadang kasihan sama nelayan ...dari dulu sampai sekarang, itu semua punya orang Tionghoa, semua kapal-kapal yang besar itu. Cuma beberapa orang yang punya kapal satu-dua itu orang kita-nya, juga nggak gede, kecil-kecil.”

Pemilik modal dari kegiatan perikanan modern di Muara Angke dengan kapal canggih adalah perusahaan perikanan, sementara pemilik modal dari kegiatan perikanan tradisional adalah para pemasok. Pemasok memegang peran penting karena nelayan tidak memiliki modal usaha, misalnya untuk kebutuhan perbaikan kapal. Nelayan di Muara Angke tidak dapat memperkaya diri karena memiliki sifat ketergantungan terhadap pemasok, membuat mereka terlilit dalam hutang yang melemahkan kedudukannya di pasar.

B. Hubungan Sosial Berbasis Ekonomi antar Masyarakat Nelayan dan Buruh Angkut

Budaya perikanan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi regional apabila dijadikan sebagai sumber mata pencaharian (Fauzi, 2010: 9). Budaya perikanan yang berorientasi ekonomi di Muara Angke mempengaruhi hubungan sosial antar kelompok masyarakatnya karena hubungan sosial yang terjalin berdasarkan pada kegiatan perikanan. Keterkaitan hubungan sosial dengan orientasi ekonomi antara masyarakat dengan pemilik modal menimbulkan sikap ketergantungan.

Pada buruh angkut berlaku pola interaksi sosial yang sifatnya lebih leluasa. Tidak terjadi hubungan ketergantungan maupun pola-pola hubungan sosial yang erat antara buruh angkut dengan keluarga nelayan. Buruh angkut biasanya berafiliasi dengan pemilik/penyewa gerobak (bagi yang tidak memiliki gerobak) dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuannya untuk mengangkut muatan ikan, tetapi hubungan ini tidak menimbulkan ketergantungan bagi buruh angkut. Sebagai salah satu buruh angkut di Muara Angke, Pak Fahrudin mengaku bahwa buruh angkut hanya membayar sewa gerobak harian sehingga tidak ada ikatan yang bersifat eksploitatif antara buruh angkut dengan pemilik gerobak seperti hubungan antara nelayan dengan pemilik kapal.

Dalam kegiatan operasional, proses pengangkutan ikan dari dermaga menuju TPI dibantu oleh buruh-buruh angkut yang beroperasi di sekitar pelabuhan. Usai melaut, nelayan mendaratkan muatan ikannya di dermaga, kemudian buruh angkut membantu membawanya ke TPI, pasar ikan, maupun tempat pengolah ikan. Tujuan pengangkutan bergantung pada siapa pembeli ikan tersebut, apakah pedagang, pengolah ikan, atau dilelang terlebih dahulu di TPI. Pada awalnya, proses pengangkutan ini dilakukan dengan menggunakan alat pikul atau pikulan. Memasuki tahun 1990-

an akhir, gerobak mulai digunakan oleh buruh angkut sebagai pengganti pikulan karena lebih efektif dan efisien.

Seorang buruh angkut bernama Matroji yang sudah menetap sejak 1990an mengatakan, selain mengangkut ikan-ikan dari kapal ke TPI buruh angkut juga membawa ikan-ikan langsung ke pabrik-pabrik dan tempat pengasinan yang tertelak di sekitar pelabuhan untuk langsung diekspor atau diolah. Meski alur kerja yang ditekuni para buruh angkut cukup jelas, mereka tidak setiap saat mendapatkan muatan untuk diangkut. Sambil memarkir gerobak dorongnya, para buruh angkut duduk-duduk di pinggiran dermaga, menanti datangnya muatan dari kapal yang kedatangannya tidak menentu. Berbeda dengan para nelayan yang masih beroperasi pada malam hari, buruh angkut ini kebanyakan pulang ke rumah pada sore hari. Hal ini menyebabkan nelayan harus menangani ikan-ikan hasil tangkapannya sendiri pada malam hari, dibantu oleh para buruh nelayan.

Begitu muatan sampai di tempat pelelangan, muatan akan diangkut lagi ke tiga tempat berbeda: tempat penyimpanan (gudang) apabila belum terlelang, tempat pengolahan (pabrik ikan atau tempat pengasinan), dan tempat pemasaran (pasar). Meskipun perusahaan ikan swasta, industri pengolah ikan, serta pedagang bisa langsung mendapatkan ikan dari nelayan, namun tidak sedikit yang mendapatkan ikan-ikan melalui kegiatan pelelangan. Orang-orang yang bekerja di tempat pelelangan ikan Muara Angke merupakan para nelayan dan pedagang yang diawasi oleh petugas dari UPT PKPI (Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan) Muara Angke.

C. Relasi Gender

Pekerjaan sebagai nelayan di Jawa didominasi oleh laki-laki. Dalam skala penuh, 83% dari jumlah nelayan di Jawa berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan karena masih adanya sistem kekerabatan yang bersifat partilineal, yakni laki-laki memiliki peran sebagai kepala keluarga serta tulang punggung keluarga (Roch, 1998: 147).

Di Muara Angke sendiri hampir seluruh nelayan dan buruh angkut berjenis kelamin laki-laki. Istri-istri nelayan maupun buruh angkut ada yang ikut membantu pekerjaan suaminya dengan menjadi pedagang ikan, tetapi sebagian lain wanita di Muara Angke tidak memiliki pekerjaan sambilan dan hanya sibuk mengurus anak di rumah. Beberapa pekerjaan lain yang dilakukan oleh wanita-wanita Muara Angke adalah ikut menjadi buruh nelayan, buruh pengupas udang, membuka toko kelontong, dan menjadi buruh industri di Muara Karang, misalnya buruh konveksi. Hal ini serupa dengan penuturan Casinah, lihat kutipannya:

“...nelayan itu laki-laki semua. Istrinya di rumah ngurus anaknya. Ya ada yang bisa bantu suaminya dagang, ya kelihatannya dagang

kecil-kecilan, entah mider-mider entah apa. Ada yang kuli-kuli, gitu.”

Ada kalanya pekerjaan sebagai pedagang yang dilakukan oleh istri-istri nelayan dapat membantu keluarganya untuk melakukan mobilitas vertikal (Kusnadi, 2002: 6); tetapi, tidak semua istri nelayan di Muara Angke yang bekerja sebagai pedagang dapat membantu keluarganya untuk melakukan mobilitas vertikal. Hal ini tergantung pula oleh modal yang dimiliki oleh para istri ini dalam menjalankan usahanya.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa sebagai wilayah yang menjunjung kegiatan perikanan sebagai basis mata pencaharian utama, wanita masih memiliki peran sekunder dalam kegiatan perikanan karena tenaganya tidak langsung disalurkan untuk menjadi nelayan ataupun buruh angkut. Mereka sekedar bertindak sebagai buruh atau pembantu dalam kegiatan lain, serta memiliki peran minor dalam kegiatan utama perikanan. Pekerjaan sebagai nelayan dan buruh angkut merupakan pekerjaan keras yang sudah didominasi oleh kalangan laki-laki. Kurangnya jaminan kesehatan ataupun jaminan keselamatan bagi para nelayan dan buruh angkut membuat wanita sebagai kaum yang fisiknya lebih lemah daripada laki-laki lebih banyak dibebani tanggung jawab mengurus anak, namun tetap diberikan kebebasan untuk bekerja sambil dalam kegiatan yang tidak menguras tenaga fisik seperti nelayan dan buruh angkut.

Pemusatan Kegiatan Perikanan di Muara Angke: Pembangunan Tanpa Perubahan Ekonomi

Pembangunan fasilitas dan infrastruktur di Muara Angke merupakan implementasi kebijakan pemerintah yang berdampak positif bagi kegiatan perikanan karena meningkatkan tingkat produktivitas kegiatan perikanan dan menjadikan Muara Angke sebagai pelabuhan perikanan terproduktif di Jakarta. Tabel berikut akan memberikan gambaran pertumbuhan produksi di beberapa TPI di Jakarta:

NAMA TPI	1979		1980		1981	
	Produksi	Nilai Produksi	Produksi	Nilai Produksi	Produksi	Nilai Produksi
KAMAL	237	49	306	53	370	90
MUARA ANGKE	9860	1171	12744	1357	4742	1000
PASAR IKAN	2472	257	1854	166	1483	166
KALI BARU	1251	208	887	145	1088	128
DONGGALA	381	59	69	10	INACTIVE	INACTIVE

Tabel 2.
Pertumbuhan Produksi di Tempat Pengolahan Ikan di Jakarta, 1979-1981. Satuan produksi: Ton, dalam jutaan rupiah. Sumber: *Biro Pusat Statistik*

Pembangunan yang terjadi tidak dibarengi dengan perubahan ekonomi masyarakatnya. Untuk menjadi negara maju, menurut pendapat Walt Whitman Rostow (1959: 1) dalam artikel *The Stages of Economic Growth*, sebuah negara harus melalui lima tahap, yakni dari masyarakat statis atau tradisional, kemudian melalui tahap prasyarat, lalu lepas landas, kemudian tahap berdikari, dan yang terakhir menjadi masyarakat adil dan makmur. Pembangunan yang dilakukan tidak mengentaskan masyarakat Muara Angke dari kemiskinan. Tokoh Ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo dikutip melalui Deliarnov (2006: 90) pernah menyatakan, “fungsi industri dalam negara kita hendaknya dipandang sebagai perkuatan dasar ekonomi di samping lapangan agraria. Jelaslah sudah bahwa menurut hemat saya, suatu perubahan di dalam konstelasi perekonomian hanya dapat dicapai, apabila perkembangan produksi agraria disertai proses pembangunan industri”. Berdasarkan kutipan tersebut, Sumitro membedakan antara lapangan agraria dengan sektor industri, dengan mengubah orientasi ekonominya, lapangan agraria bisa berubah menjadi sektor industri. Hal ini berlaku pula pada kegiatan perikanan tradisional di Muara Angke yang bersifat agraris bisa berubah menjadi kegiatan industri perikanan.

Perubahan orientasi dari lapangan agraris atau ekonomi tradisional menjadi sektor industri atau ekonomi modern salah satunya dipengaruhi oleh kepemilikan modal dan alat produksi yang digunakan oleh masyarakat. Faktor kepemilikan modal dan alat produksi menurut Rostow yang dikutip Gilarso (2004: 333) merupakan prasyarat yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan ekonomi. Sebagian besar nelayan di Muara Angke merupakan buruh dalam sektor perikanan. Dalam hal modal, nelayan buruh di Muara Angke tidak memiliki kekuatan. Kapal-kapal bermotor yang bermuatan besar merupakan kepunyaan dari perusahaan Tionghoa, bukan milik nelayan Muara Angke, sedangkan Nelayan pemilik kapal di Muara Angke hanya memiliki modal kecil dibandingkan dengan perusahaan perikanan. Meskipun masyarakat nelayan sudah mengoperasikan kapal bermotor, sebagai buruh, masyarakat nelayan masih merupakan bagian dari faktor produksi. Padahal, untuk menjadi masyarakat dengan orientasi ekonomi modern, nelayan sudah harus bisa keluar dari perannya sebagai buruh untuk menjadi wirausaha yang memiliki teknologi pendukung sehingga dapat mengubah pola perikanan yang bersifat agraris menjadi bersifat industri. Maka, sementara para nelayan Muara Angke masih berorientasi ekonomi tradisional, perusahaan perikanan pemilik kapal besar sudah memiliki orientasi ekonomi modern.

Belum adanya perubahan ekonomi dalam masyarakat nelayan di Muara Angke merupakan permasalahan yang luput dari perhatian pemerintah pasca pembangunan wilayah pemukiman dan pemusatan kegiatan perikanan di Muara Angke. Meskipun telah dilakukan pembangunan dalam bidang

fasilitas pelabuhan, hanya perusahaan besar dan para pemilik modal yang menerima keuntungan terbesar dari pemusatan kegiatan perikanan ini. Padahal, nelayan dan buruh merupakan penduduk terbanyak di Muara Angke, namun hanya mendapatkan sedikit bagian dari hasil kegiatan perikanan yang mereka kerjakan.

Tidak adanya perubahan ekonomi merupakan penghalang bagi masyarakat Muara Angke untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, sementara masyarakat yang belum sejahtera bisa dikatakan sebagai masyarakat miskin. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kesejahteraan masyarakat Muara Angke antara lain: pengeluaran konsumsi rumah tangga, ketenagakerjaan, kependudukan, perumahan, pendidikan, serta tingkat kesehatan. Indikator-indikator tersebut diperoleh dari Indikator Kesejahteraan Rakyat oleh BPS tahun 2012 (Setyawati, et.al., 2014: 25). Lihat tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga di bawah sebagai salah satu indikator:

Pekerjaan	Pendapatan	Pengeluaran
Nelayan	Rp 160.000	Rp 180.000
Pengolah Ikan	Rp 143.000	Rp 153.000
Pedagang	Rp 165.000	Rp 253.000
Pegawai	Rp 149.000	Rp 200.000
Lainnya	Rp 117.000	Rp 250.000

Tabel 3.
Perbandingan Pendapatan dan Pengeluaran Bulanan
Rata-rata Masyarakat Muara Angke tahun 1989.

Sumber: *Peserta Pendidikan Statistik Terapan Pusdiklat Pemerintah Daerah DKI Jakarta, 1989*

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Muara Angke memiliki pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Hal ini merupakan salah satu indikasi kemiskinan yang terjadi di Muara Angke.

Pada indikator selanjutnya, yaitu ketenagakerjaan, masyarakat Muara Angke merupakan masyarakat yang rentan kemiskinan karena tidak banyak diversifikasi lapangan pekerjaan di Muara Angke. Selain itu, hanya sebagian kecil saja masyarakat yang sukses (para pemilik modal), sisanya merupakan buruh miskin (Nadia, 2015: 57).

Dalam hal kependudukan, Muara Angke merupakan wilayah padat penduduk yang disertai mobilitas penduduk yang tinggi. Hal ini dilatarbelakangi Muara Angke sebagai salah satu tujuan migrasi nelayan dari wilayah lain. Berdasarkan penuturan nelayan tradisional setempat, didapati fakta bahwa kepadatan penduduk yang menimbulkan pemukiman kumuh

di Muara Angke disebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk menyewa/membeli perumahan yang dibangun oleh pemerintah.

Selain beberapa indikator penghambat kesejahteraan masyarakat nelayan Muara Angke di atas, tingkat pendidikan masyarakat Muara Angke juga masih rendah. Lihat tabel berikut:

Pendidikan Akhir	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Sekolah	Mengurus Rumah Tanga	Lainnya	Jumlah
Tidak Lulus SD	31	27	113	35	199	399
SD	183	14	108	132	36	473
SMP	41	11	38	20	13	123
SMA	40	5	13	6	11	75
AK/PT	5	-	-	-	-	5
Jumlah	300	32	291	193	259	1.075

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan dan Jenis Kegiatan Penduduk Muara Angke tahun 1989.

Sumber: *Peserta Pendidikan Statistik Terapan Pusklat Pemerintah Daerah DKI Jakarta, 1989*

Akses masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan masih terhambat karena pendapatan masyarakat bahkan belum mencukupi kebutuhan pokok rumah tangganya. Ketidakmampuan masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan diiringi pula dengan tidak adanya jaminan kesehatan. Dengan demikian, indikator-indikator yang telah disebutkan menunjukkan bahwa masyarakat Muara Angke masih berada dalam kemiskinan.

Kemiskinan menurut penyebabnya dibagi menjadi dua, yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh adanya budaya maupun faktor-faktor adat yang menghalangi masyarakat untuk melakukan perubahan ke taraf hidup yang lebih baik. Kemiskinan struktural disebabkan karena ketidakberdayaan sekelompok masyarakat akibat tatanan sosial yang tidak adil karena mereka memiliki posisi yang lemah untuk berkembang (Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kedeputan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan: 2010, 8).

Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan yang terjadi di Muara Angke termasuk dalam kategori kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural di Muara Angke disebabkan karena adanya pranata sosial masyarakat perikanan yang tidak memihak pada masyarakat nelayan, sementara kemiskinan struktural disebabkan karena nelayan di Muara Angke

tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya, sehingga mereka tetap miskin. Selain itu, pemerintah juga tidak gencar membantu perubahan ekonomi maupun perubahan struktural masyarakat Muara Angke sehingga masyarakatnya masih terbelenggu dalam kemiskinan (Nadia, 2015: 80-82).

Hal yang paling krusial dari ulasan mengenai indikator kesejahteraan masyarakat Muara Angke adalah mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran masyarakat terlihat lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin bertahan hidup di Muara Angke dengan cara berhutang pada pemasok (pedagang bermodal besar), lalu membayar hutangnya dengan hasil tangkapan mereka, seperti yang terlihat dalam penuturan Sam yang telah tinggal dan mencari nafkah sebagai nelayan tradisional di sekitar Kali Adem, Muara Angke sejak tahun 1980an, berikut kutipannya:

“Jadi kalau ada kebutuhan apa-apa, minta di dia (pemasok). Kalau sekedar minta pinjem atau ngutang itu tetap ke dia si penampung ikan (pemasok). Pemasok itu yang punya modal, kalau yang nggak punya modal mah biasa, jatuhnya jadi nelayan atau kuli... Cuma kebutuhan kadang-kadang nelayan itu punya utang, ya ikannya diterima sama dia. Yang paling besar itu ada kerusakan mesin, itu pinjam ke dia.”

Hutang yang dilakukan oleh masyarakat hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan pokok, tidak untuk menunjang perbaikan modal usaha secara fundamental sehingga masyarakat miskin tetap terjatuh dalam lingkaran kemiskinan yang tidak pernah berubah polanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat miskin di Muara Angke bekerja untuk membayar hutang tetapi tidak untuk memperkaya diri.

Kesimpulan

Kegiatan pemusatan yang dilakukan di Muara Angke telah mengubah wilayah tersebut dari pangkalan pendaratan ikan sederhana menjadi pusat kegiatan perikanan tradisional di Jakarta. Meskipun demikian, hanya beberapa oknum bermodal besar seperti perusahaan perikanan dan pemasok ikan yang berhasil mendapatkan penghasilan yang signifikan dari kegiatan perikanan di Muara Angke. Sebagian besar nelayan dan buruh hanya mampu menyumbangkan tenaganya, sehingga mendapatkan upah yang kecil.

Adanya sistem patrilineal menyebabkan pria mendominasi pekerjaan sebagai nelayan dan buruh angkut. Adakalanya wanita ikut membantu dalam kegiatan perikanan sementara sebagian besar memilih untuk mengasuh anak. Selain itu, adanya pranata sosial di Muara Angke menyebabkan nelayan berkecimpung dalam kemiskinan. Pranata tersebut yakni hubungan ketergantungan yang eksploitatif antara nelayan dan pemilik modal. Akibatnya, nelayan terjatuh dalam hutang dan sistem bagi hasil yang tidak

menguntungkan. Pranata sosial yang dialami oleh buruh angkut bersifat lebih leluasa dan tidak eksploitatif karena jam kerjanya yang lebih fleksibel dan mereka tidak memiliki ketergantungan pada pemilik modal.

Referensi

Buku, Laporan Penelitian

- Akhmad Fauzi. *Ekonomi Perikanan – Teori, Kebijakan, dan Pengolahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Biro Pusat Statistik. *Produksi Perikanan Laut di Jawa 1979-1981*. Jakarta: BPS, 1983.
- Deliarnov. *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kedeputian Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. *Laporan Akhir – Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I)*. Jakarta: BAPPENAS, 2010.
- Fauzie Amrullah. *Indonesia Membangun Jilid I – Indonesia Develops*. Jakarta: Dumas Sari Warna, 1988.
- Heuken SJ, Adolf. *Atlas Sejarah Jakarta – Historical Atlas of Jakarta*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2014.
- Indah Kurniasari, “Keberlanjutan Pemukiman Nelayan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara”, Tesis S2, Program Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia, 2005.
- Sastrawidjaja, J. Roch. “A Note on The Demographic, Economic and Social Structures of Fishermen Households”, dalam J. Roch, et.al. (eds.), *The Large Seiners of The Java Sea: Fishermen’s Incomes in Proceedings of Socio-economics, Innovation and Management of the Java Sea Pelagic Fisheries*. Jakarta: Puslitbangkan, 1998.
- Kusnadi. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Kusnadi. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Monique Ida Batuna, “Pusat Kegiatan Masyarakat (Community Center) Pemukiman Nelayan Muara Angke”, Skripsi S1, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1996.
- Pantas Angelia, et.al., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Nelayan di Muara Angke, Jakarta”, *Buletin Ekonomi Perikanan*, Vol. VI, No.2, 2006.
- Para Peserta Pendidikan Statistik Terapan. *Profil Sosial Ekonomi Penduduk Komplek Perumahan Nelayan Muara Angke Jakarta Utara*. Jakarta: Pusdiklat Pemerintah Daerah DKI Jakarta, 1989.
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kebudayaan dan Permuseuman. *Ensiklopedi Jakarta – Culture & Heritage*. Jakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2005.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Profil UPT Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke*. Jakarta: UPT PKPP dan PPI Muara Angke, 2011.

- R.A. Nidha Nadia, "Sejarah Masyarakat Perikanan Muara Angke (1977-1995)", Skripsi S1, Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 1996.
- Rostow, W.W., "The Stages of Economic Growth", The Economic History Review, New Series, Vol. 12, No. 1, 1959.
- Suwarno Setyawati, et.al. Analisis Pencapaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) – Background Study RPJM Kelautan dan Perikanan 2015-2019. Jakarta: Kerjasama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), 2014.
- Soewito, et.al. Sejarah Perikanan Indonesia. Jakarta: Yasmina, 2000.
- T. Gilarso. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Surat Kabar

"Peraturan tentang Penghunian Rumah Sewa bagi Nelayan", Kompas, 20 Januari 1989, hlm. 3.

Sumber Lisan

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan	Waktu/Lokasi
1	Casinah	Pengolah ikan	Tinggal di Muara Angke sejak tahun 1970an	13 Mei 2015. Pukul 17.46 WIB di Komplek Pengasinan Muara Angke
2	Hasan Sairi	Mantan nelayan Muara Angke	Tinggal di Muara Angke sejak sebelum tahun 1970an	20 Januari 2013. Pukul 10.45 WIB di Kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Muara Angke
3	Fahrudin	Buruh angkut	Tinggal di Muara Angke sejak tahun 1990an	5 Mei 2015. Pukul 13.26 WIB di sekitar Pelabuhan Muara Angke
4	Matroji	Buruh angkut	Tinggal di Muara Angke sejak tahun 1990an	3 Februari 2015. Pukul 13.45 WIB di Pelabuhan Muara Angke
5	Sam	Nelayan Tradisional dan Mantan Nelayan Buruh Perusahaan	Tinggal di Muara Angke sejak tahun 1980an	14 Juni 2015. Pukul 17.40 WIB di sekitar Kali Adem